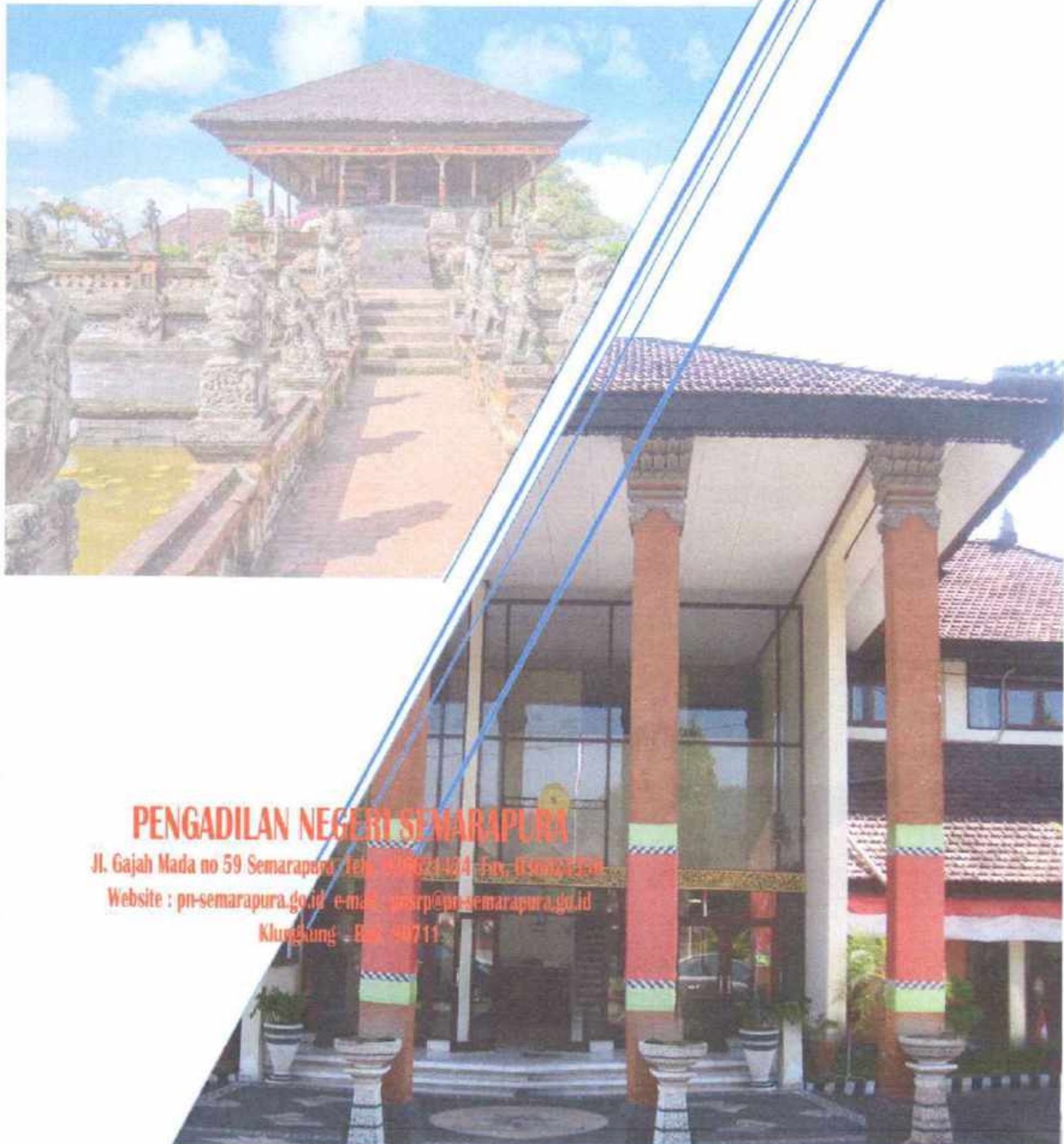


LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA



PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Jl. Gajah Mada no 59 Semarang / Telp. 021-8234424 / Fax. 021-8234334

Website : pn-semarapura.go.id e-mail : pn-srp@pn-semarapura.go.id

Klungkung - Bkt. 50711



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Pengadilan Negeri Semarang yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 mengenai Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing, dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Semarang.

Laporan ini disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Semarang selama Tahun 2021 dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya sehingga belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan yang berlaku mengenai penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian LKjIP Tahun 2021 Pengadilan Negeri Semarang disusun sebagai bahan untuk penyusunan LKjIP Mahkamah Agung RI.

Semarang, Januari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Semarang

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.
NIP. 197704162000121001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2021 ini disusun. LKjIP Tahun 2021 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visinya yaitu "Terwujudnya Pengadilan Negeri Semarang yang Agung".

Pengadilan Negeri Semarang telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2021. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 19 indikator kinerja dan 19 target kinerja

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, terdapat tiga Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik ($\geq 100\%$), yaitu Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Sedangkan sasaran strategis lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik ($\leq 100\%$), yaitu Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Semarang adalah **sebesar 96.39%**. Dari nilai capaian tersebut mengindikasikan dari 9 Indikator Kinerja terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak mencapai target, antara lain:

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu,
2. Persentase penurunan penurunan sisa perkara,

3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, dan

4. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Tabel Capaian Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100 100	100 100	100 100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	95 95	92.00 91.92	96.84 96.76
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	50 50	- 81.82 - 700.00	- 163.64 - 1400
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95 95 95	94.70 97.82 99.38	99.69 102.97 104.61

		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50	50	100
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	100	125
CAPAIAN SASARAN 1					- 57.98%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	95	100	105.26
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	7	6.25	89.29
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90	100	111.1
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0	0	0

CAPAIAN SASARAN 2					76.41%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	0	0	0
CAPAIAN SASARAN 3					33.33%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	33.33%	333.33%
CAPAIAN SASARAN 4					333.33%
TOTAL CAPAIAN SASARAN					96.39%



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GAMBAR	IX
DAFTAR GAMBAR	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024	5
B. Rencana Kinerja Tahun 2020	7
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021.....	12
A. Capaian Kinerja Tahun 2021	12
B. Realisasi Anggaran	43
BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran-saran.....	45



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Capaian Sasaran Strategis	III
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2021	7
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	10
Tabel 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2021.....	13
Tabel 5. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	16
Tabel 6. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2017-2021	19
Tabel 7. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	21
Tabel 8. Persentase Penurunan Sisa Perkara.....	22
Tabel 9. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	24
Tabel 10. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	25
Tabel 11. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.....	26
Tabel 12. Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi.....	27
Tabel 13. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	29
Tabel 14. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	30
Tabel 15. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2017-2021.....	31
Tabel 16. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	32
Tabel 17. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2017-2021.....	34
Tabel 18. Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2017-2021	35
Tabel 19. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	36
Tabel 20. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan	

Terpinggirkan.....	38
Tabel 21. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	39
Tabel 22. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan..	40
Tabel 23. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).....	41
Tabel 24. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	42
Tabel 25. Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2017-2021	44
Tabel 26. Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2021	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kabupaten Klungkung	3
--	---



DAFTAR GAMBAR

Grafik 1. Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Tahun 2017-2021.....	17
Grafik 2. Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2017-2021.....	32
Grafik 3. Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan Tahun 2017-2020.....	38
Grafik 4. Capaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.....	43



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Semarang merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang sebagai birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Semarang mempunyai visi : **"Mewujudkan Pengadilan Negeri Semarang Yang Agung"**

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi Semarang/Kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Semarang yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Dasar Hukum Penyusunan LKjIP yaitu Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah; Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Semarapura membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020. LKjIP itu sendiri merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Dengan adanya laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*obligation to answer*) yaitu menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Semarapura merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Bali dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Semarapura bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Klungkung. Pengadilan Negeri Semarapura beralamat di Jalan Gajah Mada No. 59, Telpn (0366) 21424, Fax (0366) 24350, *Website* : www.pn-semarapura.go.id , *E-Mail* : pnsrp@pn-semarapura.go.id

a. Letak Geografis

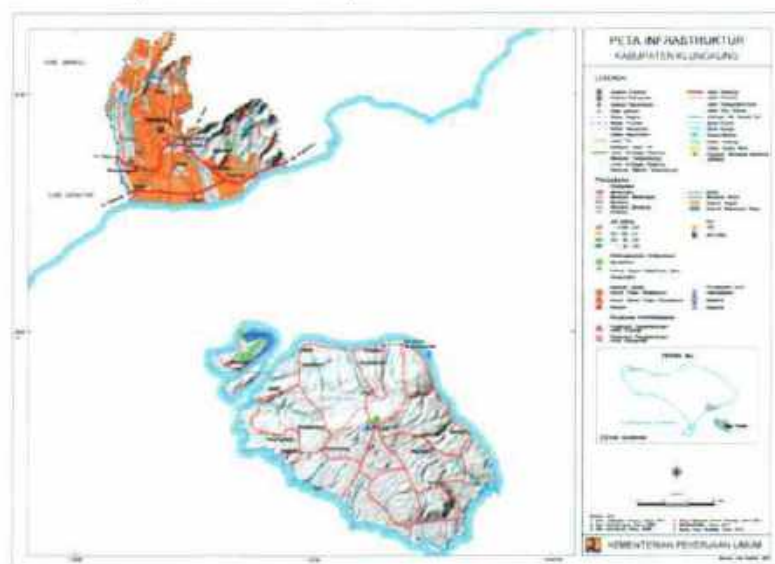
Kabupaten Klungkung adalah satu dari sembilan Kabupaten dan Kota yang ada di Propinsi Bali, Kabupaten kulungkung memiliki batas-batas wilayah:

1.	Utara	115.21'28"	Bujur Timur
2.	Timur	115.37'43"	Bujur Timur
3.	Selatan	8.27'37"	Lintang Selatan
4.	Barat	8.49'00"	Lintang Selatan

Luas wilayah Klungkung 31.500 Ha dengan rincian :

Nusa Penida	20.941
Banjarangkan	4.573
Klungkung	2.905
Dawan	3.081

Ibukota Kabupaten: Semarapura



Gambar 1. Peta Kabupaten Klungkung

2. Wewenang dan Fungsi

Pengadilan Negeri Semarapura merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Semarapura

sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum antara lain :

1. Tugas Pokok

- a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama ;
- b. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta;
- c. Selain tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

2. Fungsi

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara tingkat pertama ;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara tingkat pertama serta administrasi peradilan lainnya ;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Semarang berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Renstra (Rencana Strategis) Pengadilan Negeri Semarang yang dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan implementasi tahun Pertama dari Rencana Strategis 2020–2024 yang diperjanjikan melalui perjanjian kinerja Ketua Pengadilan Negeri Semarang dengan Ketua Pengadilan Tinggi Bali setiap awal tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan 2021.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Semarang 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Semarang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2020, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Semarang dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 -2024.

Rencana Strategis merupakan acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Semarang periode 2020-2024 yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas sumber daya manusia peradilan, sebagaimana tertuang dalam visi dan misi sebagai berikut.

1) **Visi dan Misi**

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Semarang. Visi Pengadilan Negeri Negera mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah "**Mewujudkan Pengadilan Negeri Semarang Yang Agung**".

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Negeri Semarang menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Semarang ;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Semarang ;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Semarang.

2) **Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Semarang.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam periode tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

B. Rencana Kinerja Tahun 2020

Adapun rencana kinerja tahunan tahun 2021 Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan Tabel 2.

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100 100

	Akuntabel	b. diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	95 95
		c. Persentase penurunan perkara: sisa - Perdata - Pidana	50 50
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95 95 95
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	10
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80
		2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan	7
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara	0
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	0
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Semarang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Perjanjian kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Semarang. Dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui

sasaran yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan Tabel 2.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100 100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	95 95
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	50 50
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95 95 95
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara	50
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	80
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	95
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui	7
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat	90

		waktu	
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam	0
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	0
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Semarang merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2021. Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Semarang tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai

dalam tahun 2020 ini. Secara keseluruhan target kinerja Pengadilan Negeri dari 14 (empat belas) Indikator untuk 4 (empat) sasaran strategis, yang dinyatakan berhasil yaitu 10 (enam) indikator kinerja sedangkan sisanya 4 (empat) indikator kinerja perlu ditingkatkan di tahun tahun berikutnya. Rincian tingkat capaian kinerja masing- masing indikator kinerja tersebut diuraikan sesuai dengan Tabel 4.

Tabel 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100 100	100 100	100 100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	95 95	92.00 91.00	96.84 96.76
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	50 50	-81.82 -700	-163.64 -1400
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95 95 95	95.54 99.36 100	100.57 104.59 105.26

		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50	50	100
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	100	125
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	95	100	105.26
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	7	6.25	89.29
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90	100	111,1
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0	0	0

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	0	0	0
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10	33.33	333.33

Analisis Capaian Kinerja Organisasi

$$* \text{ Capaian : } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2021 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada Tabel 4, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2021, Pengadilan Negeri Semarang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna

melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun yang berikutnya. Adapun analisis capai kinerja Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2021 sesuai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut.



Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

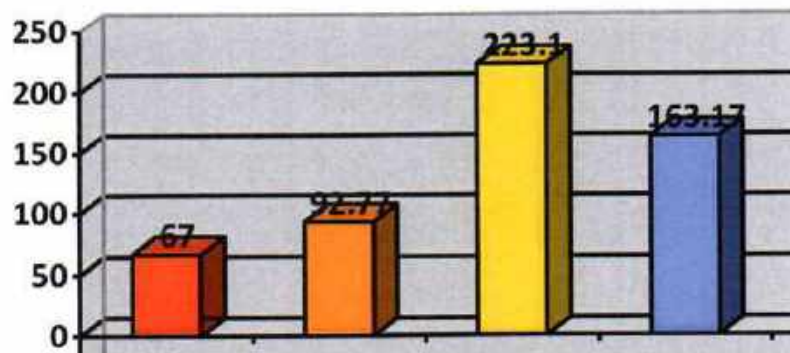
Pengadilan Negeri merupakan kawal depan dari Mahkamah Agung antara lain mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama. Dimana masyarakat pencari keadilan menaruh harapan akan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sebagaimana diuraikan pada indikator kinerja sesuai dengan Tabel 5.

Tabel 5. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA	TARGE T (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100 100	100 100	100 100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	95 95	92.00 91.00	96.84 96.76
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	50 50	-81.82 -700	-163.64 -1400

	d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	95 95 95	95.54 99.36 100	100.57 104.59 105.26
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50	50	100
	f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	80	100	125
CAPAIAN SASARAN 1				-57.98%

Pada tahun 2021 Capaian Sasaran 1 mengalami **penurunan** yang sangat drastis, hal ini di akibatkan oleh peningkatan jumlah sisa perkara yang cukup signifikan dari 2020 sebanyak 12 Perkara dan di tahun 2021 sebanyak 28 Perkara. Gambaran Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Tahun 2017-2021 sesuai dengan Grafik 1.



Grafik 1. Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Tahun 2017-2021

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 1- Indikator kinerja ke - 1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2021.
- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$$

a. Perdata

- 1) Secara akumulasi jumlah sisa perkara perdata (Gugatan dan permohonan) tahun 2020 yang diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 11 perkara dari jumlah sisa perkara Perdata tahun 2020 sebanyak 11 perkara, sehingga persentase sisa Perkara Perdata tahun 2020 yang diselesaikan pada tahun 2021 sebesar **100%**.

b. Pidana

- 1) Secara akumulasi jumlah sisa perkara Pidana (Biasa dan Anak) tahun 2020 yang diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 1 perkara dari jumlah sisa perkara Pidana tahun 2020 sebanyak 1 perkara, sehingga persentase sisa Perkara Pidana tahun 2020 yang diselesaikan pada tahun 2021 sebesar **100%**.

Analisis Capaian

Apabila dijumlahkan secara keseluruhan jumlah sisa perkara Perdata dan Pidana tahun 2020 yang diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 12 perkara dari jumlah sisa perkara tahun 2020 sebanyak 12 perkara. Persentase indikator kinerja utama sisa perkara yang diselesaikan (Perdata, Pidana) ditargetkan sebesar 100%, berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Semarang maka realisasinya didapat sebesar 100%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan (Perdata, Pidana) berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100% atau hasil yang dicapai **sudah memenuhi dari target yang ditetapkan** oleh karena sisa perkara tahun sebelumnya tidak terlalu banyak sehingga dapat diselesaikan semua di tahun berikutnya.

Tabel 6. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2017-2021

Tahun	Jenis Perkara	Sisa Perkara yang harus diselesaikan	Sisa Perkara Yang Diselesaikan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2017	Pidana	11	11	90	100	111
	Perdata	14	14	90	100	111
2018	Pidana	16	16	100	100	100
	Perdata	21	21	100	100	100
2019	Pidana	18	18	100	100	100
	Perdata	14	14	100	100	100
2020	Pidana	7	7	100	100	100
	Perdata	7	7	100	100	100
2021	Pidana	11	11	100	100	100
	Perdata	1	1	100	100	100

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-2 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100 \%$$

a. Perdata

- 1) Jumlah perkara perdata yang ada tahun 2021 sebanyak 241 perkara dengan rincian 11 Perkara yang belum putus di tahun 2020, dan 239 Perkara Masuk di 2020 jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 230 perkara, dan sisa perkara 2021 sebanyak 20 Perkara, berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama maka realisasinya didapat sebesar **92.00%**.

b. Pidana

- 1) Jumlah perkara pidana yang ada tahun 2020 sebanyak 99 perkara dengan rincian 1 Perkara yang belum putus di 2020 dan 98 Perkara masuk di tahun 2021 dan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 91 perkara, sehingga sisa perkara di tahun 2021 sebanyak 8 Perkara, berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama maka realisasinya didapat sebesar **91.92%**.

Tabel 7. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Harus Diselesaikan	Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2017	Pidana	110	94	100	85,5	85,5
	Perdata	344	323	100	93,8	93,8
2018	Pidana	99	85	90	85,8	95,3
	Perdata	348	330	90	94,8	105,3
2019	Pidana	106	99	90	92,93	104,29
	Perdata	343	336	90	96,73	107,47
2020	Pidana	83	82	95	98,79	103,98
	Perdata	272	261	95	95,95	101
2021	Pidana	99	91	95	91,92	96,60
	Perdata	241	239	95	92,00	96,76

Analisis Capaian

Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2021 adalah sebanyak 321 perkara, perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 349 perkara. Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 92.00%

dan capaiannya sebesar 96.80%. Jumlah ini turun dari tahun sebelumnya karena jumlah perkara yang harus diselesaikan semakin banyak, Berdasarkan realisasi yang di dapat sebesar 92.00% di bawah target yang sudah di ditetapkan sebesar 95% maka Jadi dapat diartikan **belum mencapai target yang telah di tetapkan.**

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-3 : Persentase Penurunan Sisa Perkara

Tabel 8. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)				
			2021	2020	2019	2018	2017
Persentase sisa perkara yang diselesaikan :							
- Perdata	50	-81.82	-163.64	-1142	611,11	25	-90
- Pidana	50	-700	-1400	1714	500,00	1,4	-100

$$\text{Persentase Penurunan Perkara} = \frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100\%$$

Catatan:

- T_n = Sisa perkara tahun berjalan
- T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya

a. Perdata

- 1) Pada tahun 2021 jumlah sisa perkara Perdata sebanyak 20 perkara, sedangkan pada tahun 2020 jumlah sisa perkara sebanyak 11 perkara. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pendaftaran perkara pada akhir tahun. Berdasarkan jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa pada

tahun 2021 terdapat peningkatan sisa perkara sebanyak 9 perkara. Sehingga penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Semarang maka realisasinya didapat sebesar -163.64% lebih kecil dari target realisasi sebesar 50%.

b. Pidana

- 1) Pada tahun 2021 jumlah sisa perkara Pidana sebanyak 8 perkara, sedangkan pada tahun 2010 jumlah sisa perkara sebanyak 1 perkara. Berdasarkan jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 terdapat Peningkatan sisa perkara sebanyak 7 perkara. Sehingga penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Semarang maka realisasinya didapat sebesar -700% atau lebih rendah dari target realisasi sebesar 50%. Hal ini disebabkan banyaknya perkara yang masuk pada di akhir tahun 2021

Analisis Capaian

Berdasarkan perhitungan penurunan sisa perkara, untuk perkara perdata terdapat peningkatan jumlah sisa perkara dari 11 perkara pada akhir tahun 2020 menjadi 20 Perkara pada tahun 2021 (81.82%) dengan nilai capaian sebesar -163.64%, untuk sisa perkara pidana mengalami peningkatan perkara dari tahun 2020 sebanyak 1 Perkara menjadi 8 Perkara di tahun 2021 (-700%) dengan nilai capaian sebesar 1400% , dari urain tersebut dapat dilihat bahwa realisasi penurunan perkara perdata dan pidana **belum mencapai target yang telah ditetapkan.**

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-4 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

- a. **Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 9. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Banding	Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2017	417	16	401	90	106,7	103.24
2018	415	9	406	90	108,6	101.70
2019	435	10	425	90	97,70	108,56
2020	343	12	331	95	96.50	101.57
2021	321	17	304	95	94.70	96.84

Pada tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding sebanyak 304 perkara dari jumlah perkara putus adalah sebanyak 321 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 94.70%, maka capaiannya adalah sebesar 96.84%. Capaian pada tahun 2021 menurun dari tahun 2020.

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 96.84% atau hasil yang dicapai **belum mencapai target yang telah di tetapkan.**

b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 10. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2017	417	8	409	90	98,1	109
2018	415	2	413	90	99,5	110,5
2019	435	4	431	90	99,08	110,09
2020	343	4	429	95	99,07	104,28
2021	321	7	314	95	97,82	102,97

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 314 perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah 4 perkara, jumlah perkara putus adalah sebanyak 321 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 97.82%.

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 102,97% atau hasil yang dicapai **sudah memenuhi dari target yang ditetapkan** walaupun capaian ini menurun dari tahun sebelumnya karena disebabkan karena menurunnya jumlah perkara yang di tangani pada tahun 2021.

c. **Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 11. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan PK	Perkara Yang Tidak Mengajukan PK	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2017	417	-	417	90	100	111
2018	415	-	415	90	100	111
2019	435	-	435	90	100	111
2020	343	1	432	95	99.76	105.1
2021	321	2	319	95	99.38	104.6 1

Pada tahun 2020 jumlah perkara mengajukan peninjauan kembali adalah sebanyak 2 Perkara dari jumlah perkara putus adalah sebanyak 321 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 99.38%.

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 104.61%, hasil yang dicapai **sudah memenuhi dari target yang ditetapkan** Namun mengalami penurunan dari capaian tahun lalu karena pada tahun

2021 terdapat 2 perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-5 : Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara anak. Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun ("PP 65/2015").

Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA sebagai berikut.

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tabel 12. Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Tahun	Jumlah Perkara Anak	Diselesaikan Secara Diversi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2017	3	0	50	0	0
2018	4	1	50	25	50

Tahun	Jumlah Perkara Anak	Diselesaikan Secara Diversi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2019	12	6	10	50.00	500
2020	7	3	10	42.85	428.5
2021	2	1	50	50	100

Tahun 2020 jumlah perkara anak adalah sebanyak 2 perkara dan yang diselesaikan secara diversi sebanyak 1 perkara, sehingga realisasi dari indikator persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi adalah sebesar 50%.

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 100% atau hasil yang **dicapai sama dengan target yang ditetapkan**.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-6 : Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

- Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di PN Semarang. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Semarang Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .
- Pada tahun 2020 indikator Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan yang ditargetkan sebesar 80%. Pengadilan Negeri Semarang dalam Tahun 2021 melaksanakan dua

kali survey dengan hasil survey pada Triwulan I Tahun 2021 sebesar 86.60% dengan jumlah responden 45 responden dengan 40 responden sudah puas dengan pelayanan di Pengadilan Negeri Semarang, pada Triwulan II Tahun 2021 sebesar 90.55 dengan jumlah responden 67 responden sudah puas dengan pelayanan di Pengadilan Negeri Semarang, Triwulan III Tahun 2021 sebesar 90.86 dengan jumlah responden 48 responden dimana 47 responden sudah puas dengan pelayanan di Pengadilan Negeri Semarang, Triwulan IV Tahun 2021 sebesar 87,83 dengan jumlah responden 21 responden dengan jumlah responden 16 sudah puas dengan pelayanan di Pengadilan Negeri Semarang. Bila dirata-ratakan dari kedua hasil survey tersebut, Pengadilan Negeri Semarang, diperoleh angka Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan sebesar 88.96% dan jumlah responden yang puas sebanyak 271 responden dari 281 responden dari hal tersebut dapat di hitung realisasinya menjadi 96,40% Responden Menyatakan puas dengan pelayanan di Pengadilan Negeri Semarang.

Tabel 13. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tahun	Jumlah Responden Survei	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2017	100	70	74,36	92,95
2018	100	70	74,36	92,95
2019	378	80	82,04	102,55
2020	216	80	82.83	103.53
2021	281	80	96.40	120.5

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 120.5% atau hasil yang dicapai **sudah melebihi target yang telah di tetapkan.** Berdasarkan tabel indeks

Kepuasan Masyarakat diatas dapat dilihat bahwa pencari keadilan semakin puas terhadap Pelayanan yang diberikan di Pengadilan Negeri Semarang.



Sasaran 2 : Peningkatan Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

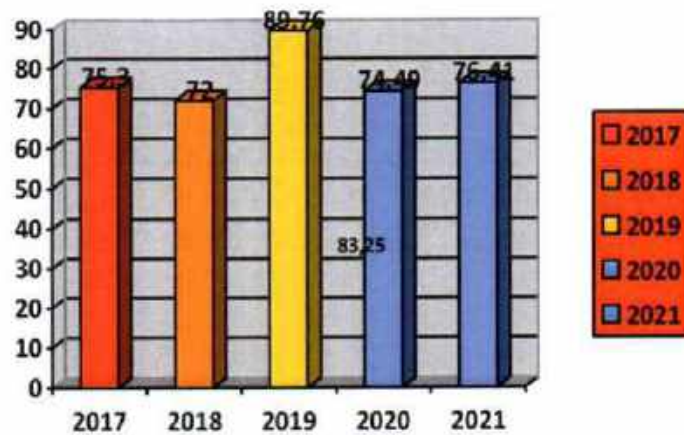
Pengadilan Negeri Semarang terus berupaya agar semua putusan yang dihasilkan pada Tahun 2020 dapat diterima oleh masyarakat. Sebagaimana diuraikan pada indikator kinerja di bawah ini:

Tabel 14. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIENERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu - Perdata - Pidana	95	100	105,26
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	7	6,25	89,29
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90	100	111,1
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0	0	0
CAPAIAN SASARAN 2					76.41%

Tabel 15. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	Capaian (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
a. Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	105	105	105,2	105.2	105.26
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10	0	74,07	74,07	89.29
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	111	111	111,1	111,1	111.1
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0	0	0	0	0



Grafik 2. Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2017-2021

Capaian sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian mengamali peningkatan dari tahun 2018 hal ini disebabkan pada tahun 2020 meningkatnya perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi

Sasaran 2 Indikator ke 1 : Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan.

Tabel 16. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2017	417	417	90	100	111,1
2018	415	415	90	100	111,1
2019	417	417	90	100	111,1
2020	343	343	95	100	105.2
2021	321	321	95	100	105.26

Jumlah putusan pada tahun 2020 adalah sebanyak 321 Perkara yang terdiri dari 91 perkara Pidana, dan 230 perkara Perdata dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 321 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100 %. **Analisis Capaian**

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 105,26%, atau hasil yang **dicapai sudah memenuhi dari target yang ditetapkan.**

Sasaran 2 Indikator ke 2 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2017 semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan

- i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat.

Tabel 17. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2017-2021

Tahun	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2017	83	1	1	1,2	1,2
2018	28	0	30	0	0
2019	27	3	10	11.11	111.1
2020	35	2	7	5.71	81.57
2021	48	3	7	6.25	89.29

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2021 adalah sebanyak 48 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 3 perkara, tidak berhasil sebanyak 41 perkara, pencabutan 1 perkara , tidak dapat dilaksanakan 1 Perkara dan perkara mediasi masih

berjalan sebanyak 3 perkara sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 6.25%, dengan capaian 89.29%.

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 89.29% atau **hasil yang dicapai belum memenuhi dari target yang diinginkan**. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya perkara yang dilakukan mediasi dari tahun sebelumnya walaupun jumlah perkara yang berhasil di mediasi meningkat dari tahun sebelumnya

Sasaran 2 Indikator ke 4 : Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK.

Tabel 18. Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2017-2021

Tahun	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2017	9	9	90	100	111,1
2018	11	11	90	100	111,1
2019	14	14	90	100	111,1
2020	17	17	90	100	111,1
2021	26	26	90	100	111.1

Tahun 2021 jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK adalah sebanyak 26 perkara dan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi

dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 26 perkara, dengan rincian Perkara Yang melakukan Upaya hukum banding sebanyak 17 Perkara, Kasasi 7 Perkara, Peninjauan Kembali 2 Perkara maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 111,11%

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 111,11% atau **hasil yang dicapai sudah memenuhi dari target yang diinginkan**. Target pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu ini bisa tercapai oleh karena kedisiplinan seluruh pegawai dan pimpinan di Pengadilan Negeri Semarang dalam melaksanakan Tupoksi, selain itu juga karena telah disediakan anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini.

Sasaran 2 Indikator ke 5 : Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus dengan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tabel 19. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Tahun	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0

Tahun	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0

Tahun 2021 jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah sebanyak 0 perkara dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus adalah sebanyak 0 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 0 % dan capaiannya 0 %

Analisis Capaian

Di pengadilan Negeri Semarang di tahun 2020 tidak ada perkara tindak pidana korupsi karena perkara tindak pidana korupsi dilaksanakan di Pengadilan Tipikor sehingga capaian adalah 0%.



Sasaran 3 : Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014.

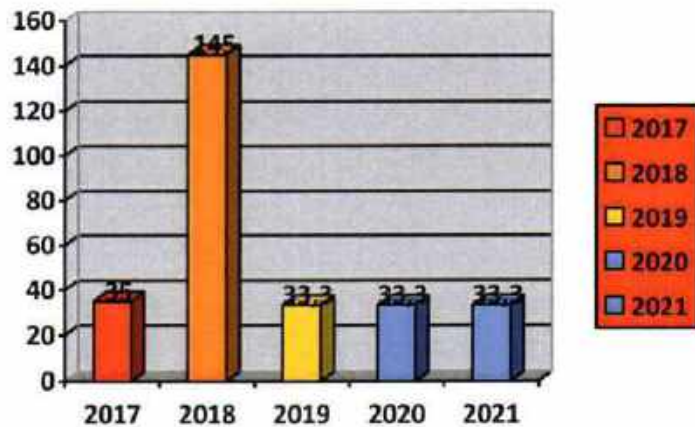
Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

- a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan

c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

Tabel 20. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	0	0	0
Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan			33.3%



Grafik 3. Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan Tahun 2017-2020

Sasaran 3 Indikator ke 1 : Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu

Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Tabel 21. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2017	0	0	100%	0%	0%
2018	1	1	50%	100%	200%
2019	0	0	0%	0%	0%
2020	0	0	0%	0%	0%
2021	0	0	0%	0%	0%

Tahun 2020 tidak ada perkara yang diajukan secara prodeo sehingga realisasi dan capaian di tahun 2020 sebesar 0%

Analisis Capaian

Pada tahun 2020 tidak ada perkara perdata yang diajukan secara prodeo, dan Pengadilan Negeri Semarang tidak mendapat alokasi anggaran untuk pendaftaran perkara prodeo

Sasaran 3 Indikator ke 2 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Tabel 22. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Tahun	Jumlah Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2017	13	13	100	100	100
2018	24	24	100	100	100
2019	60	60	100	100	100
2020	4	4	100	100	100
2021	37	37	100	100	100

Analisis Capaian

Pada Tahun 2021 Pengadilan Negeri Semarang melaksanakan sidang di luar Kantor pengadilan/zitting plaats sebanyak 37 Perkara. Perkara yang ada di

gedung Zetting Platz sudah diselesaika semua sehingga realisasinya sebesar 100% dan capaiannya 100%,

Sasaran 3 Indikator ke 3 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tabel 23. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2017	0	0	100	100	100
2018	1	1	100	100	100
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0

Tahun 2020 tidak ada jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendaftar sehingga tidak ada pencari keadilan golongan tertentu tertentu secara otomatis tidak ada bantuan layanan hokum, maka realisasinya adalah sebesar 0 % dan capaiannya 0%.

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target, dimana Pengadilan Negeri Semarang tidak ada pencari keadilan golongan tertentu secara otomatis tidak ada bantuan layanan hukum.



Sasaran 4 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

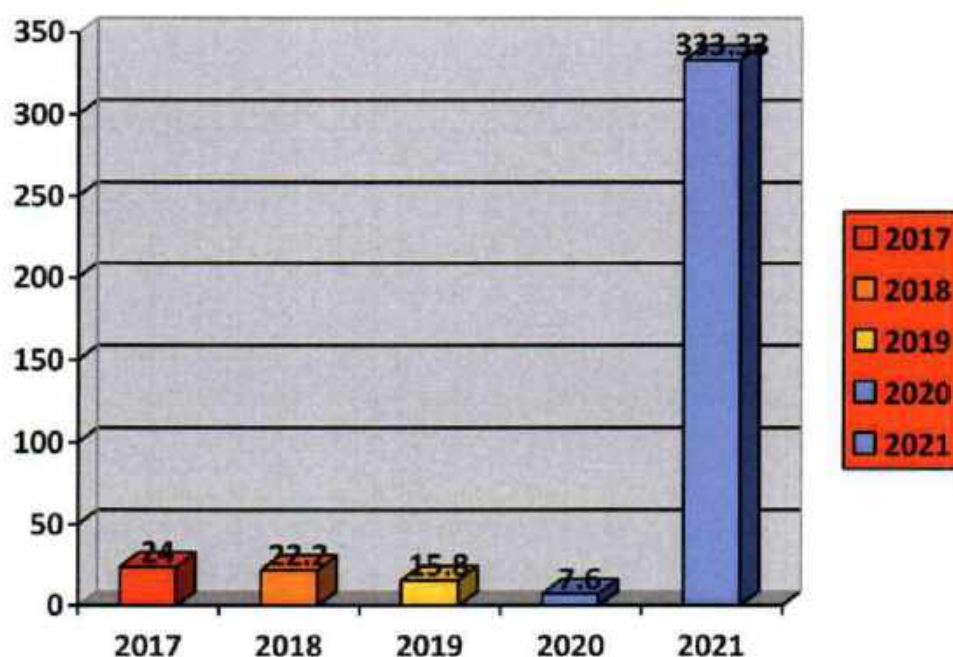
Tahun 2020 jumlah perkara gugatan yang BHT yang dimohonkan eksekusi sebanyak 3 Perkara dan jumlah perkara eksekusi yang ditindaklanjuti sebanyak 1 perkara , maka realisasinya adalah sebesar 33.33% dengan nilai capaian 333.33 %. realisasi di tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya.

Tabel 24. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tahun	Jumlah Perkara Eksekusi	Jumlah perkara eksekusi yang ditindaklanjuti	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2017	83	1	5	1,2	24
2018	90	1	5	1,11	22.2
2019	126	1	5	0.79	15.8
2020	261	1	5	0.38	7.6
2021	3	1	10	33.33	333.33

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target maka dapat dikatakan bahwa hasil yang dicapai sudah mencapai 333.33 % atau dengan kata lain bisa dikatakan bahwa untuk indikator kepatuhan terhadap putusan Pengadilan **belum memenuhi dari target yang diinginkan.**



Grafik 4. Capaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2017-2021

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Pengadilan Negeri Semarang tahun 2021 adalah sebesar 129.095.000,- Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Semarang per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp. 101.889.500,- atau sebesar 78.93%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan dengan adanya PPKM Level III Jawa Bali. Secara lebih jelas terlihat dalam Tabel 25.

Tabel 25. Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2017-2021

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2017	100.957.000,-	99.716.090,-	98,77
2	2018	89.994.000,-	88.729.400,-	98,59
3	2019	127.890.000,-	127.729.540,-	99,87
4	2020	74.100.000,-	73.986.940,-	99,85
5	2021	129.095.000,-	101.889.500,-	78,93

Realisasi sebesar Rp. 101.889.500,- merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sesuai dengan Tabel 26.

Tabel 26. Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	40.095.000,-	40.049.500,-	99,9
2	Pos Bantuan Hukum	24.000.000,-	24.000.000,-	100
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	65.000.000,-	37.840.000,-	58,22



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai upaya penguatan akuntabilitas dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pencapaian reformasi birokrasi di tubuh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Semarang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam peningkatan pelayanan aparatur hukum peradilan Umum, kesadaran hukum masyarakat dan sarana / prasarana sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama. Pengadilan Negeri Semarang telah berupaya untuk mencapai target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada awal tahun 2021, namun pada kenyataannya tidak semua target indikator kinerja utama dapat tercapai dengan baik, ada beberapa kendala yang menghambat tercapainya target tersebut, seperti Banyaknya pendaftaran perkara gugatan ataupun permohonan yang masuk pada akhir tahun.

B. Saran-saran

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk masa yang akan datang, diperlukan :

1. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan fungsi dan tugas pokok Peradilan Umum dimasa mendatang, maka dimohon kiranya Mahkamah Agung RI untuk dapat meningkatkan anggaran DIPA diantaranya anggaran operasional Kantor, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung, dan belanja modal untuk menunjang fasilitas pada Pengadilan Negeri Semarang

2. Untuk peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan para personil/pegawai Peradilan Umum, maka dimohonkan pada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Bali secara terus-menerus dapat mengadakan pelatihan baik dibidang teknis maupun non teknis.
3. Peningkatan pelayanan kepada pencari keadilan, dengan menerapkan pelayanan yang ramah, sopan dan transparan.
4. Mempermudah proses perkara gugatan ataupun permohonan yang pihaknya berada di pulau nusa penida dengan melaksanakan sidang di gedung zetting platz Pengadilan Negeri Semarapura.
5. Dengan Hasil Capain dari 4 Indikator kegiatan pada Pengadilan Negeri Semarapura tidak mencapai 100% maka perlu diadakan evaluasi untuk target-target tahun berikutnya.

LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA TAHUN 2021

LAMPIRAN 1

SK. TIM PENYUSUN LKJIP 2021



SALINAN

PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Jl. Gajah Mada Nomor 59, Telp. (0366) 21003, 21424, Fax : (0366) 24350

Semarang 80711

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
NOMOR : W24-U3/102/KP.01.2/1/2022

TENTANG
PENUNJUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP)
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Surat Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor W24-U/3232/OT.01.1/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP tahun 2021;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Tahun 2021 perlu membentuk Tim Kerja Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP);
 - d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Semarang ini, dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA TENTANG PENUNJUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
- Pertama** : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan SAKIP Pengadilan Negeri Semarang ;
- Kedua** : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Semarang ;
- Ketiga** : Setelah selesai melaksanakan tugas, tim kerja melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang ;
- Keempat** : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2022;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang

PUTU ENDRU SONATA


Desak Ketut Metriani

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
NOMOR : W24-U3/197/KP.01.2/1/2022
TANGGAL 18 Januari 2022
TENTANG PENUNJUKAN TIM KERJA
PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP)
PADA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

1. Pembina : - Ketua
- Wakil Ketua
2. Penanggung jawab : - Panitera
- Sekretaris
3. Koordinator : - Panitera Muda Perdata
- Panitera Muda Pidana
- Plt. Panitera Muda Hukum
- Kasub. Bag. Umum dan Keuangan
- Kasub. Bag. Kepegawaian, Ortala
- Kasub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan
4. Anggota : - Pelaksana/ yang diperbantukan pada setiap bagian kepaniteraan dan kesekretariatan

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

ttd

PUTU ENDRU SONATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang



Desak Ketut Metriani

LAMPIRAN 2
STRUKTUR ORGANISASI



SALINAN

PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
Jl. Gajah Mada Nomor 59, Telp. (0366) 21003, 21424, Fax : (0366) 24350
Semarapura 80711

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
NOMOR : W24-U3/2466/KP.01.2/12/2019
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI
PADA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

- Menimbang : a. Bahwa Sebagai pelaksanaan Ketentuan pasal 46 Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan dalam rangka memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara pada 4 (empat) Lingkungan peradilan, perlu menetapkan organisasidan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan ;
b. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut perlu dibentuk struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 7 Tahun 2015, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI PADA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Pertama : Menetapkan bahwa Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Semarang, adalah yang sesuai dengan lampiran pada surat keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 19 Desember 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

ttd

PUTU ENDRU SONATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang



Desak Ketut Metriani

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
 PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
 NOMOR : W24-U3/2466/KP.01.2/12/2019
 TANGGAL 19 DESEMBER 2019
 TENTANG PENETAPAN
 STRUKTUR ORGANISASI
 PADA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA



Ditetapkan di Semarang
 Pada tanggal 19 Desember 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

ttd

PUTU ENDRU SONATA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang

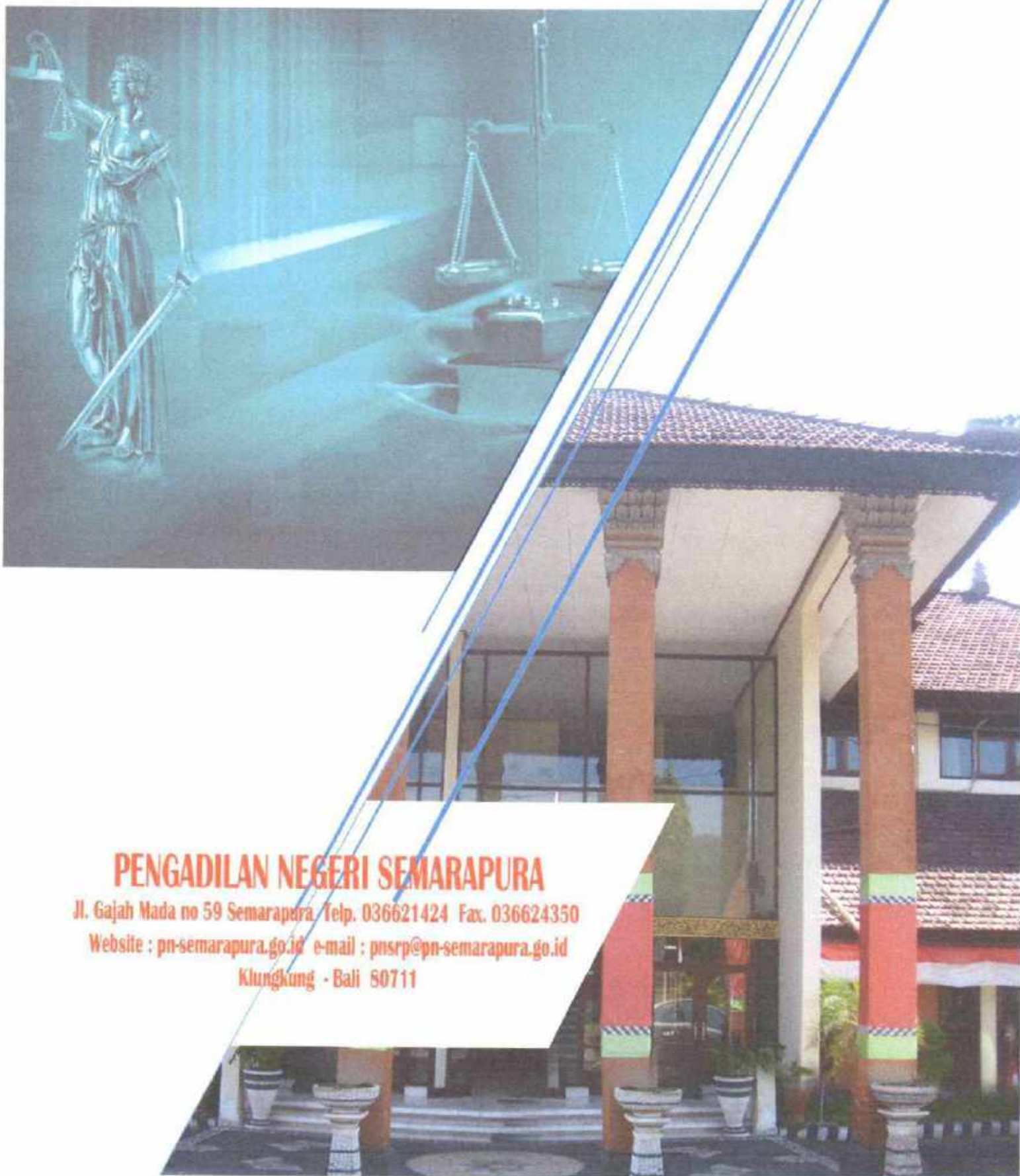


Desak Ketut Metriani

LAMPIRAN 3

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA



PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Jl. Gajah Mada no 59 Semarang Telp. 036621424 Fax. 036624350

Website : pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

Klungkung - Bali 80711



PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
Jl. Gajah Mada Nomor 59, Telp. (0366) 21003, 21424, Fax : (0366) 24350
Semarapura 80711

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
NOMOR : W24-U3/215/KP.01.2/1/2021
TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Klungkung perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Januari 2020 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Klungkung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Klungkung , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Klungkung agar tetap memiliki IKU yang valid dan

dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 25 Januari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Klungkung



PUTU BNORU SONATA, S.H., M.H.
197704162000121001

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	<p style="text-align: center;"> Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan _____ Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan _____ 100% </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	<p style="text-align: center;"> Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan _____ Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan _____ 100% </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.		
	Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana		$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1}$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya <p>Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu		$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}}$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase perkara pidana yang		$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}}$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 		
diselesaikan tepat waktu	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan	<p>$\frac{\text{persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$</p>	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Upaya Hukum Peninjauan Kembali	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 		
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi _____</p> <p>Jumlah Perkara Pidana Anak _____</p> <p>100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	<p>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan _____</p> <p>Jumlah Responden Pencari Keadilan _____</p> <p>100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu _____</p> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diputus _____</p> <p>100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Penyelesaian Perkara	yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 		
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu</p> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diputus</p> <p>100%</p>	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi		<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p> <p>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</p> <p>100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, Kasasi dan PK		<p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu</p> <p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</p> <p>100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus 100% <p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu</p> <p>Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus</p>		<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100% <p>Jumlah Perkara Prodeo</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p>		<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	<p>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p>	<p>Persentase Pencari Keadilan Golongan</p>	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) 100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu		
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) _____ Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) 100% <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

KETUA
 PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA,



PUTU ANDRU SONATA, S.H., M.H.
 NIP.197704162000121001

LAMPIRAN 4

REVIU RENSTRA TAHUN 2020-2024

Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024

- Instansi** : Pengadilan Negeri Semarang
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Semarang yang Agung
Misi :
 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan keputusannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	% 90	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
					Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
					Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	95	95	95	95

Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	95	95	95	95	95
Persentase Penurunan Sisa Perkara Perdata	50	50	50	50	50	50
Persentase Penurunan Sisa Perkara Pidana	50	50	50	50	50	50
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	95	95	95	95	95
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	95	95	95	95	95
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	95	95	95	95	95
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50	50	50	50	50	50
Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	90	90	90	90	90

LAMPIRAN 5

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021 PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA



PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Jl. Gajah Mada no 59 Semarang Telp. 036621424 Fax. 036624350

Website : pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

Klungkung - Bali 80711

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021
NO.W24-U3/ 237/OT.01.1/I/2021
Pengadilan Negeri Semarang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95

		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10

KETUA

PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA,



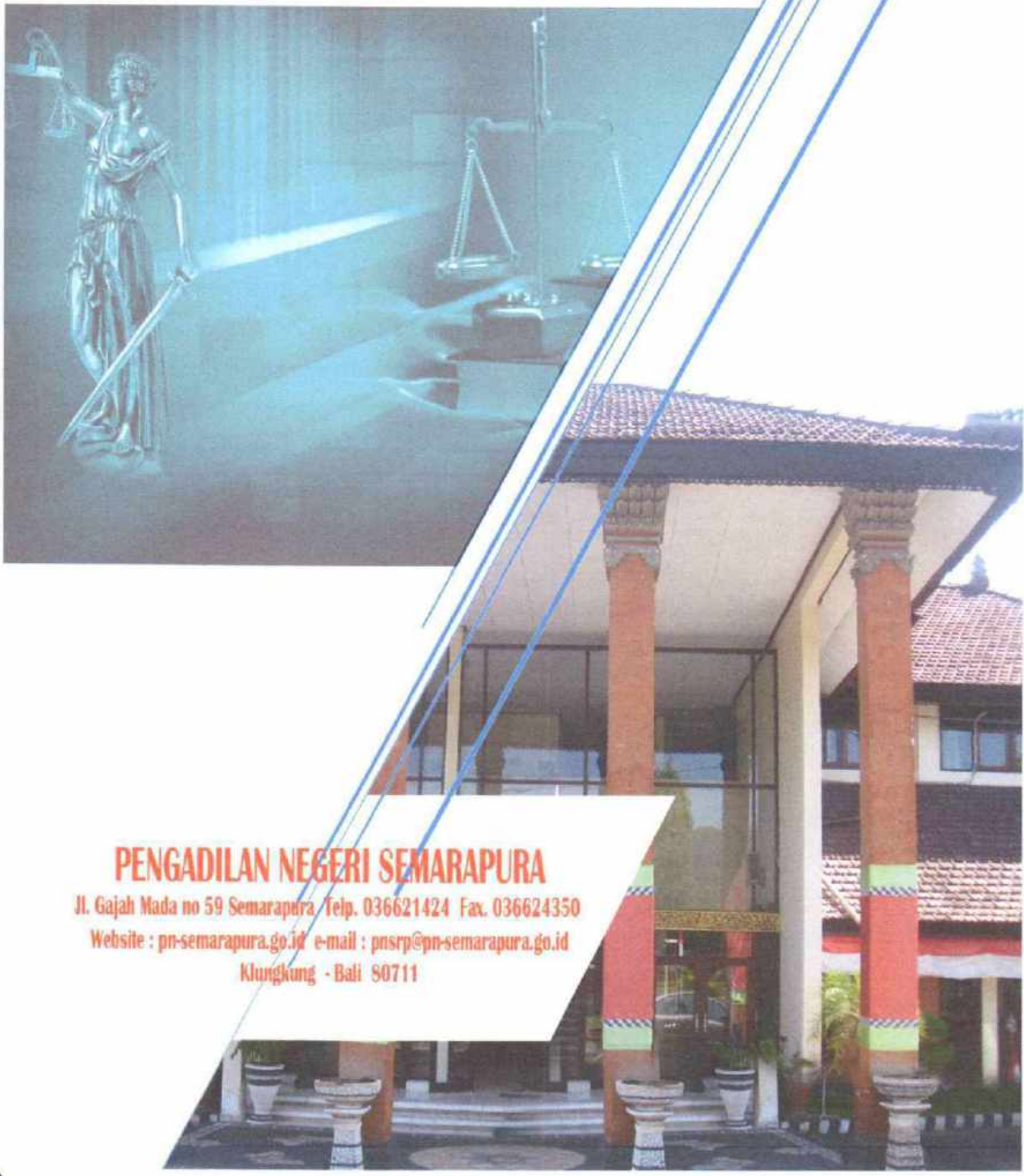
PUPU ENDRU SONATA, S.H., M.H.

NIP.197704162000121001

LAMPIRAN 6

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA



PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Jl. Gajah Mada no 59 Semarang / Telp. 036621424 Fax. 036624350

Website : pn-semarapura.go.id e-mail : pnsrp@pn-semarapura.go.id

Klungkung - Bali 80711

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
NO. W24.U3/ 95 /OT.01.1/I/2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Semarang

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Zaid Umar Bobsaid, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 4 Januari 2021

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar



ZAID UMAR BOBSAID, S.H., M.H.
NIP. 195506061982031006

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Semarang



PUTU ENDRU SONATA, S.H., M.H.
NIP. 197704162000121001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
NO. W24.U3/ 95 /OT.01.1/I/2021
Pengadilan Negeri Semarang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80
2.		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	5.121.246.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	37.500.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	129.095.000

Klungkung, 4 Januari 2020

Ketua,



PUJULENDRU SONATA, S.H., M.H.
NIP. 197704162000121001

LAMPIRAN 7
MATRIKS PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021
PERTRIWULAN



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pin.semara pura.go.id e-mail : pncrp@pn-semara pura.go.id

Bulan : Desember 2021

No.	Saaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Desember		Realisasi s.d Bulan Desember				
				Input	Realisasi %	Capaian (%)	Input	Realisasi %	Capaian (%)	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	11	0,00	0,00	11	11	100,00	100,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	1	0,00	0,00	1	1	100,00	100,00
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	16	100,00	105,26	230	230	100,00	105,26
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	10	100,00	105,26	91	91	100,00	105,26
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	26	100,00	105,26	321	304	94,70	99,69
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	26	25	96,15	321	314	97,82	102,97
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	26	26	100,00	321	319	99,38	104,61
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50	0	0,00	0,00	2	1	50,00	100,00
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	21	0,00	0,00	281	270	96,09	120,11
10.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95	16	100,00	105,26	230	230	100,00	105,26
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95	10	100,00	105,26	91	91	100,00	105,26
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	3	0,00	0,00	49	4	8,16	116,62

13.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Disajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90	1	1	100,00	111,11	17	17	100,00	111,11
14.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
16.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	4	4	100,00	100,00	37	37	100,00	100,00
17.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	10	1	0	0,00	0,00	3	1	33,33	333,33
Rata-rata Total		66,78	9,56	8,33	49,79	52,44	111,44	106,72	71,08	100,53





PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarang Telp. 036621424 Fax. 036624350
 Klungkung - Bali 80711
 pn.samarapura.go.id e-mail : pnucp@pe.samarapura.go.id

Bulan : Nopember 2021

No.	Sasaran / Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Nopember		Realisasi s.d Bulan Nopember		Capaian (%)
				Input	Realisasi %	Input	Realisasi %	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	11	0,00	11	11	100,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	1	0,00	1	1	100,00
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	12	100,00	214	214	105,26
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	3	100,00	81	81	105,26
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mongajukan Upaya Hukum Banding	95	15	93,33	295	278	94,24
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mongajukan Upaya Hukum Kasasi	95	15	93,33	295	289	97,97
7.		Persentase perkara yang Tidak Mongajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	15	100,00	295	293	104,55
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	0	0,00	2	1	50,00
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	0	0,00	260	254	97,69
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95	12	100,00	214	214	105,26
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95	3	100,00	81	81	105,26
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	3	0,00	46	4	124,22

13.		90	1	1	100,00	111,11	16	16	100,00	111,11
14.		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
16.		100	0	0	0,00	0,00	33	33	100,00	100,00
17.		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	10	1	0	0,00	0,00	2	1	50,00	500,00
Rata-rata Total		64,56	5,11	4,11	43,70	46,33	102,56	96,39	72,11	132,52





PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarang Telp. 036621424 Fax. 036624359
Klungkung - Bali 80711

pn-samarapura.go.id e-mail : pnarpi@pn-samarapura.go.id

Bulan : Oktober 2021

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Oktober			Realisasi s.d Bulan Oktober		
				Input	Realisasi		Input	Realisasi	
					%	Capaian (%)		%	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	11	0	0,00	11	11	100,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	1	0	0,00	1	1	100,00
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	19	19	100,00	202	202	100,00
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	6	6	100,00	78	78	100,00
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	25	25	100,00	280	264	94,29
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	25	25	100,00	280	275	98,21
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	25	25	100,00	280	278	99,29
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	1	0	0,00	2	1	50,00
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	0	0	0,00	260	254	97,69
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95	19	19	100,00	202	202	100,00

11.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95	6	6	100,00	105,26	78	78	100,00	105,26
12.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	2	0	0,00	0,00	43	4	9,30	132,89
13.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90	1	1	100,00	111,11	15	15	100,00	111,11
14.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
16.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	0	0	0,00	0,00	33	33	100,00	100,00
17.	Persentase Pencari Keadilan Gelongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Pobakum)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	10	0	0	0,00	0,00	1	1	100,00	1000,00
Rata-rata Total		64,56	7,83	7,00	44,44	47,11	98,11	94,28	74,93	160,80





PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarang Telp. 036621424 Fax. 036624350
Klungkung - Bali 80711
pn-semarang.go.id e-mail : pnsp@pn-semarang.go.id

Bulan :

Sep-21

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan September			Realisasi s.d Bulan September		
				Input	Realisasi %	Capaian (%)	Input	Realisasi %	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	11	0,00	0,00	11	100,00	100,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	1	0,00	0,00	1	100,00	100,00
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	15	100,00	105,26	183	100,00	105,26
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	4	100,00	105,26	72	100,00	105,26
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	19	100,00	105,26	255	239	98,66
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	19	18	94,74	255	250	98,04
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	19	19	100,00	255	253	99,22
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	0	0,00	0,00	1	100,00	1000,00
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	48	47	0,00	260	254	97,69
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95	15	100,00	105,26	183	100,00	105,26

11.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95	4	4	100,00	105,26	72	72	100,00	105,26
12.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	5	0	0,00	0,00	41	4	9,76	139,37
13.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90	1	1	100,00	111,11	14	14	100,00	111,11
14.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpungkirkan	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
16.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	0	0	0,00	0,00	33	33	100,00	100,00
17.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	10	0	0	0,00	0,00	1	1	100,00	1000,00
Rate-rata Total		64,56	8,94	7,89	44,15	46,80	90,94	87,28	77,69	188,89

Semarang, 1 Oktober 2021
Panitera Pengadilan Negeri Semarang


Nyoman Sudarsana, SH
NIP.197606111993031002



PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarang Telp. 036621424 Fax. 036624359
Klungkung - Bali 80711

pn-samarapura.go.id e-mail : pnspj@pn-samarapura.go.id

Bulan : Agustus 2021

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Agustus			Realisasi s.d Bulan Agustus		
				Input	Realisasi %	Capaian (%)	Input	Realisasi %	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	11	0	0,00	11	11	100,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	1	0	0,00	1	1	100,00
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	19	19	100,00	168	168	105,26
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	8	8	100,00	68	68	105,26
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	27	26	96,30	236	220	93,22
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	27	27	100,00	236	232	98,31
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	27	26	96,30	236	234	99,15
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	0	0	0,00	1	1	100,00
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	0	0	0,00	212	207	97,64
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95	19	19	100,00	168	168	100,00
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95	8	8	100,00	68	68	100,00

12.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	2	1	50,00	714,29	36	4	11,11	158,73
13.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Dajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	50	2	2	100,00	111,11	13	13	100,00	111,11
14.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
16.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	0	0	0,00	0,00	33	33	100,00	100,00
17.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	10	1	1	100,00	0,00	1	1	100,00	1000,00
Rata-rata Total		64,56	8,44	7,61	52,57	86,36	82,67	79,39	77,75	189,94





PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarang, Telp. 036621424 Fax. 036624359

Klungkung - Bali 80711

pn-samarapura.go.id e-mail : pnarp@pn-samarapura.go.id

Bulan : Juli 2021

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Juli			Realisasi s.d Bulan Juli		
				Input	Realisasi %	Capaian (%)	Input	Realisasi %	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	11	0	0,00	11	11	100,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	1	0	0,00	1	1	100,00
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	15	15	100,00	149	149	105,26
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	14	14	100,00	60	60	105,26
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	29	28	96,55	209	194	92,82
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	29	29	100,00	209	205	98,09
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	29	29	100,00	209	208	99,52
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	0	0	0,00	1	1	100,00
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	100	100	0,00	212	207	97,64
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95	15	15	100,00	149	149	105,26

11.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95	14	14	100,00	105,26	60	60	100,00	105,26
12.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	4	1	25,00	357,14	34	3	8,82	126,05
13.	Persentase Berhasil Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Dijjukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90	1	1	100,00	111,11	11	11	100,00	111,11
14.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
16.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	0	0	0,00	0,00	33	33	100,00	100,00
17.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Pobakum)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	10	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Rata-rata Total										
		64,56	14,56	15,67	45,64	66,75	74,89	71,78	72,05	132,55





PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarang Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pt-semara-putra.go.id e-mail : puwpr@pt-semarapura.go.id

Bulan: Juni 2021

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Juni		Realisasi s.d Bulan Juni		Capaian (%)
				Input	Realisasi %	Input	Realisasi %	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	11	1	11	11	100,00
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	1	0	1	1	100,00
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	27	27	134	134	105,26
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	13	13	46	46	105,26
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	40	33	180	166	97,08
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	40	40	180	176	102,92
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	40	39	180	179	104,68
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	0	0	1	1	100,00
9.		Index Kepuatan Pencari Keadilan	80	67	67	112	107	119,42
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95	27	27	134	134	105,26

11.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95	13	13	100,00	105,26	46	46	100,00	105,26
12.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	6	0	0,00	0,00	30	2	6,67	95,24
13.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Dijjukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90	1	1	100,00	111,11	10	10	100,00	111,11
14.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
16.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	0	0	0,00	0,00	33	33	100,00	100,00
17.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Postbakum)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	10	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Rata-rata Total		64,56	15,89	14,50	43,84	46,44	61,00	58,11	71,76	130,64





PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarang Telp. 036621424 Fax. 036624350

Klungkung - Bali 80711

pt-samaraputara.go.id e-mail : ptw/ptn@pt-samaraputara.go.id

Bulan : Mei 2021

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Mei			Realisasi s.d Bulan Mei			
				Input	Realisasi %	Capaian (%)	Input	Realisasi %	Capaian (%)	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	11	1	9,09	11	10	90,91	90,91
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	1	0	0,00	1	1	100,00	100,00
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	27	27	100,00	107	107	100,00	105,26
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	7	7	100,00	33	33	100,00	105,26
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	34	33	97,06	140	133	95,00	100,00
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	34	34	100,00	140	136	97,14	102,26
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	34	34	100,00	140	140	100,00	105,26
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	0	0	0,00	1	1	100,00	1000,00
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	0	0	0,00	45	40	88,89	111,11
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95	27	27	100,00	107	107	100,00	105,26

11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95	7	7	100,00	105,26	33	33	100,00	105,26
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	3	1	33,33	476,19	24	2	8,33	119,05
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90	1	1	100,00	111,11	9	9	100,00	111,11
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	11	11	100,00	100,00	33	33	100,00	100,00
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
18.	Meningkatnya Kepetuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Rata-rata Total			64,56	10,94	10,17	52,19	79,45	45,76	43,61	71,13	131,15





PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarapura Telp 036621424 Fax. 036624359

Klungkung - Bali 80711

ps-samarapura.go.id e-mail : pnspp@ps.samarapura.go.id

Bulan : Apr-21

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan April			Realisasi s.d Bulan April			
				Input	Realisasi %		Input	Realisasi %		
					Capaian (%)	Realisasi %		Capaian (%)	Realisasi %	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	11	3	27,27	11	9	81,82	31,82
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	1	0	0,00	1	1	100,00	100,00
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	13	13	100,00	80	80	100,00	105,26
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	1	1	100,00	26	26	100,00	105,26
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	14	14	100,00	106	100	94,34	99,30
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	14	14	100,00	106	102	96,23	101,29
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	14	14	100,00	105	106	100,00	105,26
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	0	0	0,00	1	1	100,00	1000,00
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	0	0	0,00	45	40	88,89	111,11
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95	13	13	100,00	80	80	100,00	105,26
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95	1	1	100,00	26	26	100,00	105,26
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	3	1	33,33	21	1	4,76	68,03
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90	0	0	0,00	8	8	100,00	111,11

14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Milik dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	0	0	0,00	22	22	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rata-rata Total			64,56	4,72	4,11	42,26	35,30	33,44	68,91	70,34	70,34	127,72	127,72





PENGADILAN NEGERI KLUNGGUNG

Jl. Gajah Mada no. 59 Semarang Telp. 036621424 Fax. 036624359
Klungkung - bab. 80711

pn-samarapura.go.id e-mail : pnarp@pn-samarapura.go.id

Bulan : Maret 2021

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Maret			Realisasi s.d Bulan Maret		
				Input	Realisasi %	Capaian (%)	Input	Realisasi %	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	11	2	18,18	11	6	54,55
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	1	0	0,00	1	1	100,00
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	25	25	100,00	67	67	100,00
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	8	8	100,00	25	25	100,00
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	33	29	87,88	92	86	98,40
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	33	32	96,97	92	88	100,69
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	33	33	100,00	92	92	100,00
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	0	0	0,00	1	1	100,00
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	45	40	0,00	45	40	88,89
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95	25	25	100,00	67	67	100,00
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95	8	8	100,00	25	25	100,00
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	5	0	0,00	18	0	0,00

13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Dijukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90	3	3	100,00	111,1111111	8	8	100,00	111,11
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan Terpapgirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	12	12	100,00	100	22	22	100,00	100,00
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjut (Djelaskan)	10	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Rata-rata Total			64,56	13,44	12,06	50,17	52,79	31,44	29,33	68,48	122,34





PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no.59 Semarang Telp. 036621424 Fax. 036624359
Klungkung - Bali 80711
pn-semarang.go.id e-mail : pnwpr@pn-semarang.go.id

Bulan : Februari 2021

No.	Susran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Februari			Realisasi s.d Bulan Februari		
				Input	Realisasi %		Input	Realisasi %	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	11	1	9,09	11	4	36,36
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	1	1	100,00	1	1	100,00
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	22	22	100,00	42	42	100,00
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	14	14	100,00	17	17	100,00
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	36	34	94,44	59	57	96,61
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	36	33	91,67	59	56	94,92
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	36	36	100,00	59	59	100,00
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	1	1	100,00	1	1	100,00
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	0	0	0,00	0	0	0,00
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95	22	22	100,00	42	42	100,00
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95	14	14	100,00	17	17	100,00
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	4	0	0,00	13	0	0,00

13.		90	5	5	100,00	0	5	5	100,00	111,11
14.		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
15.		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
16.		100	4	4	100,00	100	10	10	100,00	100,00
17.		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
18.		10	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		64,56	11,44	10,39	60,84	40,56	18,57	17,25	62,66	115,30
		Rata-rata Total								





PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG

Jl. Gajah Mada no 59 Semarang Telp. 036621424 Fax. 036624359
 Klungkung - Bali 80711
 pn-klungkung.go.id e-mail : pnk@pn.klungkung.go.id

Bulan : Januari 2021

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Januari			Realisasi s.d Bulan Januari		
				Input	Realisasi %	Capaian (%)	Input	Realisasi %	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	11	3	27,27	11	3	27,27
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	1	0	0,00	1	0	0,00
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	20	20	100,00	20	20	100,00
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	3	3	100,00	3	3	100,00
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	23	23	100,00	23	23	100,00
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	23	23	100,00	23	23	100,00
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95	23	23	100,00	23	23	100,00
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	0	0	0,00	0	0	0,00
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	0	0	0,00	0	0	0,00
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95	20	20	100,00	20	20	100,00
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	95	3	3	100,00	3	3	100,00
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	7	9	0	0,00	9	0	0,00

LAMPIRAN 8
DAFTAR PENGHARGAAN



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : W24.U/3269/HM.05.8/12/2021

Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar memberikan penghargaan ini kepada :

PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA KELAS II



Atas keberhasilan dalam mengikuti lomba - lomba tahun 2021 se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar, sebagai :

JUARA II KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dengan score (791%)

Untuk itu diucapkan terimakasih dengan harapan terus meningkatkan kemampuan / pelayanan yang lebih baik lagi.

Denpasar, 29 Desember 2021
Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

H. Mochamad Hatta, S.H., M.H



HANBAL

KPPN
AMLAPURA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMLAPURA

memberikan penghargaan kepada

Pengadilan Negeri Kungkung

Peringkat II

Kinerja Pengelolaan Rekening Satuan Kerja Semester II Tahun 2021

Amlapura, 12 Januari 2022
Kepala KPPN Amlapura

Masta

Masta Boru Manurung





**PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 1045/DJU/SK/OT01.3/3/2021**

TENTANG

**NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN NEGERI KLAS IB DAN KLAS II
TAHUN 2020**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : }
Mengingat : } dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TENTANG NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN NEGERI KLAS IB DAN II TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri
klas IB dan II berdasarkan rapat Komite Keputusan Akreditasi
Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
dalam rentang waktu Januari sampai dengan Maret 2021 adalah
sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersifat mutlak dan
tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pengadilan yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2021

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



Kepada :

Ketua Pengadilan Negeri Semarapura

**PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 1045/DJU/SK/OT01.3/3/2021
TANGGAL 10 Maret 2021**

NO.	NAMA PENGADILAN	KLAS	NILAI AKREDITASI SEBELUMNYA	NILAI AKREDITASI 2020	PREDIKAT
1 s/d 260	dst.				
261	Pengadilan Negeri Semarang	II	720	714	A
262 s/d 304	dst.				

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



PRIM HARYADI

Export Excel

REKAPITULASI PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
Januari - Desember 2021

NO	BULAN	SISA BULAN LALU			MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS BULAN INI	BELUM PEMBAGIAN MAJELIS	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI GAGAL	HUGUR (TA-BU)	JUMLAH PUTUS	JUMLAH MEDIASI BERHASIL	MUNDARI BULAN INI	BELUM MUNDARI	TUA AKHIR PERKARA	
		SELUK PUTUS	JUDAH PUTUS BELUM ANDUTASI	MEDIASI BERHASIL BELUM ANDUTASI													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	11	0	0	10	21	6	1	0	3	0	0	6	0	6	0	15
2	Februari	15	0	0	14	29	6	1	0	5	0	0	6	0	6	0	23
3	Maret	23	0	0	12	35	14	1	0	5	0	0	14	0	14	0	21
4	April	21	0	0	7	28	9	1	0	5	0	0	9	0	9	0	19
5	Mei	19	0	0	10	29	11	2	0	2	0	0	11	0	11	0	18
6	Juni	18	0	0	16	34	16	6	0	3	0	0	16	0	16	0	18
7	Juli	18	0	0	9	27	12	2	0	6	0	0	12	0	12	0	15
8	Agustus	15	0	0	6	21	10	1	0	3	0	0	10	0	10	0	11
9	September	11	0	0	13	24	10	1	0	2	0	1	10	0	10	0	13
10	Oktober	14	0	0	12	26	9	3	0	3	0	0	9	0	9	0	17
11	November	17	0	0	8	25	10	2	0	4	0	0	10	0	10	0	15
12	Desember	15	0	0	11	26	10	0	0	5	0	0	10	0	10	0	16
TOTAL					128		124		0	45	0	1			123		



Semarang, 4 Januari 2022

Sanitara
Nirwan

INYOMAN SUDARSSANA, S.H.
NIP.196706111993031002

Export Excel

**REKAPITULASI PERKARA PERMOHONAN
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
Januari - Desember 2021**

NO	BULAN	SISA-BULAN LALU			MASUK	PESAN BULAN INI	PUTUS BULAN INI	BELUM PEMBAGIAN MAJELIS	MEDIASI BERHASI	MEDIASI GAGAL	DUGUR CABUT	JUMALAH PUTUS	JUMLAH MEDIASI BERHASIL	MINDUTASI BULAN INI	BELUM MINDUTASI	SISA AKHIR PERKARA	
		BELUM PUTUS	PUTUS BELUM MINDUTASI	MEDIASI BERHASIL BELUM MINDUTASI													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	0	0	0	21	21	14	0	0	0	0	0	14	0	14	0	7
2	Februari	7	0	0	9	16	16	0	0	0	0	0	16	0	16	0	0
3	Maret	0	0	0	13	13	11	0	0	0	0	0	11	0	11	0	2
4	April	2	0	0	2	4	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	1
5	Mei	1	0	0	20	21	16	0	0	0	0	0	16	0	16	0	5
6	Juni	5	0	0	6	11	11	0	0	0	0	0	11	0	11	0	0
7	Juli	0	0	0	6	6	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	4
8	Agustus	4	0	0	5	9	8	0	0	0	0	0	8	0	8	0	1
9	September	1	0	0	6	7	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	3
10	Oktober	3	0	0	6	9	7	0	0	0	0	0	7	0	7	0	2
11	November	2	0	0	3	5	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	3
12	Desember	3	0	0	7	10	6	0	0	0	0	0	6	0	6	0	4
TOTAL					194		100		0	0	0	0			100		



Semarang, 4 Januari 2022

Panitera
Mirna

INYOMANSUDARJANA, S.H.
NIP. 19670611993031002

Export Excel

**LAPORAN REKAPITULIASI PERKARA GUGATAN SEDERHANA
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
2021**

No	Periode	Jumlah Perkara Diharing	Jumlah Perkara Diputus	Status Penyelesaian Perkara			Jenis Kelamin	
				Akta Terdamanan	Penetapan Ditunda	Penetapan Gugur	Laki-Laki	Petempuan
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	1	-	-	-	-	4	3
4	April	-	1	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	1	-	-	-	-	1	1
7	Juli	1	1	-	-	-	1	1
8	Agustus	2	1	-	-	1	1	2
9	September	2	1	-	-	-	1	2
10	Oktober	-	3	-	-	-	3	-
11	November	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		7	7	-	-	1	6	9



Semarang, 4 Januari 2022

Panitera
[Signature]

LIYOMAN SUDARSIANA, S.H.
NIP. 196706111993031002

Export Excel

**REKAPITULASI PERKARA PERMOHONAN KONSINYASI
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
Januari - Desember 2021**

NO	BULAN	SISA BULAN LALU			MASUK	SEBANYAK BULAN INI	PULUS BULAN INI	BELUPA PEMBAGIAN ANALISIS	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI GAGAL	GUGUR CAKUP	Jumlah Putus	Jumlah Mediasi Berhasil	Aminat Bulan Ini	Belum Mputusi	Sisa Akhir Perkara	
		Belum Pulus	Pulus Belum Aminat	Aminat Berhasil													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	38
12	Desember	38	0	0	74	112	70	42	0	0	0	0	70	0	70	0	42
TOTAL					112	30	30		0	0	0	0	70	0	70	0	



Semarang, 4 Januari 2022

Panitera
Mery
M

LINDYMAN SUDARSONA, S.H.
NIP. 196706111993031002

Export Excel

**REKAPITULASI PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
Januari - Desember 2021**

NO	BULAN	INA-BULAN/LALUYANE SELUKA DIRMINTASI	MASUK	REBAN BULAN INI	PUTUS	BEUM-PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MEMUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	USA-AREP PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUDILAH TERPIDANA
1	7	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari		103	104	88	1	88	88	0	16	302	119
2	Februari	16	785	801	794	0	794	794	0	7	2390	816
3	Maret	7	815	822	819	0	819	819	0	3	2458	830
4	April	3	397	400	393	0	393	393	0	7	1186	401
5	Mei	7	220	227	216	1	216	216	0	11	664	236
6	Juni	11	975	986	976	0	976	976	0	10	2937	997
7	Juli	10	326	336	328	1	328	328	0	8	978	341
8	Agustus	8	66	74	70	0	70	70	0	4	205	78
9	September	4	91	95	89	0	89	89	0	6	276	101
10	Oktober	6	85	91	87	0	87	87	0	4	260	94
11	November	4	348	352	345	0	345	345	0	7	1042	354
12	Desember	7	180	187	179	0	179	179	0	8	543	188
	Total		4391		4384			4384			13241	4555



Semarang, 4 Januari 2022.

Panitera
M. M.

INYOMAN SUDASSANA, S.H.
NIP. 196706111993031002

Export Excel

**REKAPITULASI PERKARA PIDANA CEPAT
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
Januari - Desember 2021**

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DINILAI	MASUK BULAN INI	BERAH BULAN INI	PUTUS	BELUM HENDUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINDA SI BULAN INI	PUTUS BELUM MINDA SI	SEA AY HIP PERKARA	JUMLAH TIDAK WAJIB	JUMLAH TEPIDAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	0	2	2	2	0	2	2	0	0	6	4
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	1	1	1	0	1	1	0	0	3	2
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	3	3	3	0	3	3	0	0	6	3
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	1	1	1	0	1	1	0	0	2	1
12	Desember	0	2	2	2	0	2	2	0	0	8	5
	Total		9	9	9		9	9			25	15



Semarang, 4 Januari 2022

Panitera
[Signature]

LNYOMANSUDASESANA, S.H.
NIP.196706111993031002

Export Excel

**REKAPITULASI PERKARA PIDANA SINGKAT
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
Januari - Desember 2021**

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIRMUTASI	MASUK	BERBAN BULAN INI	PUTUS	SELESAI PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MURUTASI	SISA AKHIR PERKASA	JUMLAH JERDAMWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total		0		0			0			0	0



Semarang, 4 Januari 2022

Panitera
Nyoman Sudassana, S.H.

NYOMAN SUDASSANA, S.H.
NIP. 196706111993031002

Export Excel

**REKAPITULASI PERKARA PIDANA ANAK
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
Januari - Desember 2021**

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DINYATAKAN	MASUK BULAN INI	REBAN BULAN INI	PUTUS	REVISI/ PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MILITASI BULAN INI	PUTUS BELUM MILITASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAMWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
2	Februari	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			2	2	2		2			3	3	1

Semarang, 4 Januari 2022



Panitera
 DEWI ENDANG SONATA, S.H., MH
 NIP. 197307162000121001

Export Excel

**REKAPITULASI PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
Januari - Desember 2021**

NO	BULAN	DINA BULAN LALU YANG BELUM DIMPULASI	MASUK BULAN (3)	REBAH BULAN (3)	PULUS	BELUM PERLINDUNGAN MAJELIS HAKIM	PULUS SAMPAI BULAN (3)	AMILIASI BULAN (3)	PULUS BELUM AMILIASI	SEK AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH PERHIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	0	85	85	85	0	85	85	0	0	255	85
2	Februari	0	781	781	781	0	781	781	0	0	2343	781
3	Maret	0	811	811	811	0	811	811	0	0	2433	811
4	April	0	392	392	392	0	392	392	0	0	1176	392
5	Mei	0	209	209	209	0	209	209	0	0	627	209
6	Juni	0	963	963	963	0	963	963	0	0	2889	963
7	Juli	0	314	314	314	0	314	314	0	0	942	314
8	Agustus	0	62	62	62	0	62	62	0	0	186	62
9	September	0	85	85	85	0	85	85	0	0	255	85
10	Oktober	0	82	82	82	0	82	82	0	0	246	82
11	November	0	342	342	342	0	342	342	0	0	1026	342
12	Desember	0	169	169	169	0	169	169	0	0	507	169
	Total		4295		4295		4295	4295			12885	4295



Semarang, 4 Januari 2022

Panitera
Nirmala
W

LIYOMAN SUDARJANA, S.H.
NIP.196706111993031002

Export Excel

**REKAPITULASI PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
Januari - Desember 2021**

NO	BULAN	SISA BULAN BALI YANG BELUM DIMUTASI	MASUK	SERAH BILAN TER	PUSUS	BELUM PENYUNJUKAN MAJU JUS HAKMA	PUSUS TANGPAI BELA GINI	AMIKTASI BELA GINI	PUTUS BELUM MELITASI	SISA AKHIR PERASA	JUMLAH TERAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari		16	17	1	1	1	1	0	16	41	30
2	Februari	16	4	20	13	0	13	13	0	7	47	35
3	Maret	7	3	10	7	0	7	7	0	3	22	17
4	April	3	5	8	1	0	1	1	0	7	10	9
5	Mei	7	11	18	7	1	7	7	0	11	37	27
6	Juni	11	12	23	13	0	13	13	0	10	48	34
7	Juli	10	9	19	11	1	11	11	0	8	30	24
8	Agustus	8	4	12	8	0	8	8	0	4	19	16
9	September	4	6	10	4	0	4	4	0	6	21	16
10	Oktober	6	3	9	5	0	5	5	0	4	14	12
11	November	4	5	9	2	0	2	2	0	7	14	11
12	Desember	7	9	16	8	0	8	8	0	8	28	14
Total			87		80		80	80		331	245	



Semarang, 4 Januari 2022

Sanitera
 (Mimi)

INYOMAN SUDARSONA, S.H.
 NIP. 196706111993031002

LAMPIRAN 10
REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BULAN DESEMBER 2021

SATKER : PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA/ 099816
PROVINSI : BALI
BAG ANGGARAN : 005. 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI
NO DIPA : SP DIPA.005.01.2.099816/2021 TGL 23 Nopember 2020

NO	KODE	JENIS BELANJA/ MAK*)	PAGU DIPA	REALISASI SID BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI SID BULAN INI		SISA DANA SID BULAN INI		KE T
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(6+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12(11/4)	13
1	1066	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	5,202,881,000	3,425,248,191	65.83	289,404,907	5.56	3,714,653,098	71.40	188,659,050	3.24	
	1066.EAA.001	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Adminitrrasi										
	001	Layanan Perkantoran										
	511111	GAJI DAN TUNJANGAN	1,611,040,000	1,491,582,920	92.59	119,099,360	7.39	1,610,682,280	99.98	357,720	0.02	
	511119	Belanja Gaji Pokok PNS	31,000	25,305	81.63	2,530	8.16	27,835	89.79	3,165	10.21	
	511121	Belanja Pembulanan Gaji PNS	130,231,000	100,329,590	77.04	8,133,280	6.25	108,462,870	83.28	21,768,130	16.72	
	511122	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	31,681,000	28,664,240	90.48	2,341,658	7.39	31,005,898	97.87	675,102	2.13	
	511123	Belanja Tunjangan Anak PNS	28,140,000	26,130,000	92.86	2,010,000	7.14	28,140,000	100.00	0	0.00	
	511124	Belanja Tunjangan Struktural PNS	1,435,210,000	1,323,660,000	92.23	91,525,000	6.38	1,415,185,000	98.60	20,025,000	1.40	
	511125	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	178,796,000	124,477,076	69.62	8,565,439	4.79	133,042,515	74.41	45,753,485	25.59	
	511126	Belanja Tunjangan PPH PNS	91,083,000	84,224,460	92.47	6,662,640	7.31	90,887,100	99.78	195,900	0.22	
	511129	Belanja Tunjangan Beras PNS	338,652,000	229,155,000	67.67	45,370,000	13.69	275,525,000	81.36	63,127,000	18.64	
	511151	Belanja Uang Makan PNS	15,470,000	12,270,000	79.31	915,000	5.91	13,185,000	85.23	2,285,000	14.77	
		Jumlah Kegiatan 1066.EAA.001	3,860,334,000	3,420,518,591	88.61	285,624,907	7.40	3,706,143,498	96.01	154,190,502	3.99	
002		OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KAMTOR										
	A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN										
	521111	Belanja Kebutuhan Perkantoran										
		Pengadaan/Pengisian Inventaris	2,200,000	1,200,000	54.55	950,000	43.18	2,150,000	97.73	50,000	2.27	
		Pengadaan Meja Kerja Kayu	5,094,000	5,092,000	99.96		0.00	5,092,000	99.96	2,000	0.04	
		Pengadaan Vertical Blind	9,108,000	9,108,000	100.00		0.00	9,108,000	100.00	0	0.00	
		Air Minum/ Galon	1,860,000	1,539,000	82.74	319,000	17.15	1,858,000	99.89	2,000	0.11	
		Lengkapan Surat Kabar	3,600,000	3,300,000	91.67	300,000	8.33	3,600,000	100.00	0	0.00	
		Biaya Penjilidan	2,565,000	1,714,000	66.82	850,000	33.14	2,564,000	99.96	1,000	0.04	
		Honorarium dan THR PPNPN	259,740,000	219,780,000	84.62	39,960,000	15.38	259,740,000	100.00	0	0.00	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	22,998,000	17,800,000	77.40	5,193,800	22.58	22,993,800	99.98	4,200	0.02	
	521811	Belanja Barang untuk Peresediaan Konsumsi	72,624,000	70,683,250	97.33	1,937,100	2.67	72,620,350	99.99	3,650	0.01	
	B	LANGGANAN DAYA DAW JASA										
	521111	Belanja Kebutuhan Perkantoran										
		Tambahan Langganan internet	10,750,000	9,000,000	83.72	2,000,000	18.60	11,000,000	102.33	-250,000	-2.33	
		Langganan Web Hosting	3,000,000	3,000,000	100.00		0.00	3,000,000	100.00	0	0.00	
		Langganan internet	156,000,000	129,750,000	83.17	26,000,000	16.67	155,750,000	96.84	250,000	0.16	
		Langganan Lisensi Anti Virus	9,750,000	-	0.00	9,750,000	100.00	9,750,000	100.00	0	0.00	
		Langganan Lisensi Video Conference	3,000,000	3,000,000	100.00		0.00	3,000,000	100.00	0	0.00	
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,196,000	4,791,400	92.21	394,500	7.59	5,185,900	99.81	10,100	0.19	
	522111	Belanja Langganan Listrik	100,500,000	89,656,950	89.21	9,393,951	9.35	99,050,901	98.56	1,446,099	1.44	
	522112	Belanja Langganan Telepon	1,524,000	1,415,985	92.91	105,598	6.93	1,521,583	99.84	2,417	0.16	

522113	Belanja Langganan Air	4,116,000	3,904,800	94.87	207,900	5.05	4,112,700	99.92	3,300	0.08
522141	Bantuan Sawa Rumah Dinas Hakim	68,040,000	50,650,000	74.44	4,850,000	7.13	55,500,000	81.57	12,540,000	18.43
C										
523111	PEMELIHARAAN KANTOR									
	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan									
	Pemeliharaan halaman gedung/ bangunan kantor	4,000,000	3,913,000	97.83	87,000	2.18	4,000,000	100.00	0	0.00
	Pemeliharaan gedung/bangunan kantor bertingkat	161,600,000	128,741,500	79.67	32,853,000	20.33	161,594,500	100.00	5,500	0.00
	Pemeliharaan gedung zoning plaza	8,000,000	7,992,000	99.90		0.00	7,992,000	99.90	8,000	0.10
523116	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	41,400,000	33,280,000	80.39	8,112,000	19.59	41,392,000	99.98	8,000	0.02
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Perlatan dan Mesin	17,200,000	16,729,588	97.27	470,000	2.73	17,199,588	100.00	412	0.00
	Pemeliharaan PC/ Notebook	7,600,000	6,270,000	82.50	1,330,000	17.50	7,600,000	100.00	0	0.00
	Pemeliharaan printer	2,688,000	2,568,000	95.54	120,000	4.46	2,688,000	100.00	0	0.00
	Pemeliharaan CCTV	30,200,000	26,859,991	88.94	3,336,713	11.05	30,196,704	99.99	3,296	0.01
	Pemeliharaan dan operasional kendaraan roda 4 Pinjam Pakai Pemandu Klungkung	24,600,000	22,003,342	89.44	2,591,845	10.54	24,595,187	99.98	4,813	0.02
	Pemeliharaan inventaris kantor	7,050,000	5,900,000	83.69	1,150,000	16.31	7,050,000	100.00	0	0.00
	Pemeliharaan AC Split	10,000,000	8,600,000	86.00	1,400,000	14.00	10,000,000	100.00	0	0.00
	Bahan Bakar Genzet	0	-	#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	Pemeliharaan Genzet	1,580,000	1,510,131	95.58	65,000	4.11	1,575,131	99.69	4,868	0.31
	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	65,145,000	60,548,856	92.94	4,593,050	7.05	65,141,906	100.00	3,094	0.00
D										
521115	PEMBAYARAN TERPAJIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	46,085,000	38,618,000	83.80	7,466,000	16.20	46,086,000	100.00	0	0.00
521116	Honor Operasional Satuan Kerja	15,598,000	15,598,000	100.00		0.00	15,598,000	100.00	0	0.00
521118	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,849,000	2,849,000	100.00		0.00	2,849,000	100.00	0	0.00
	Tambahan Pakaian Dinas	1,958,000	1,958,000	100.00		0.00	1,958,000	100.00	0	0.00
	Pakaian kerja Fungemudi, Pramubakti	12,688,000	12,664,300	99.81		0.00	12,664,300	99.81	23,700	0.19
	Pakaian dinas pegawai									
E										
521119	PELANYAMAN DAN PENGEMBELAN SUMPAAH JABATAN	2,950,000	2,950,000	100.00		0.00	2,950,000	100.00	0	0.00
	Belanja Barang Operasional Lainnya	222,000	222,000	100.00		0.00	222,000	100.00	0	0.00
	Konsumsi									
	Spanduk									
522151	Belanja Jasa Profesi	800,000	800,000	100.00		0.00	800,000	100.00	0	0.00
	Jasa Rohan/lewan									
F										
521119	RAPAT KOORDINASI INTERNAL	1,020,000	1,012,000	99.22		0.00	1,012,000	99.22	8,000	0.78
	Belanja Barang Operasional Lainnya	9,568,000	7,834,000	81.88	1,700,000	17.77	9,534,000	99.64	34,000	0.36
	Bahan									
	Konsumsi Rapat Rutin									
G										
524111	KONSULTASI KE TINGKAT BANDING									
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa									
	> Keuangan									
	- Penginapan	0	-	#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	- Transport luar kota	0	-	#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	- Uang Harian	0	-	#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	> Perencanaan									
	- Penginapan	0	-	#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	- Transport luar kota	0	-	#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	- Uang Harian	0	-	#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	#DIV/0!

524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota - Transport Dari Kantor ke Pelabuhan - Transport Penyebrangan Laut - Transport Dari Pelabuhan ke Tempat Sidang - Uang Harian	11.000.000 11.000.000 16.500.000 20.900.000	3.200.000 3.300.000 4.960.000 6.270.000	- 29.09 30.00 30.00 30.00	3.400.000 3.800.000 5.700.000 7.220.000	30.91 34.55 34.55 34.55	- 6.600.000 7.100.000 10.650.000 13.490.000	- 60.00 64.55 64.55 64.55	4.400.000 3.900.000 5.850.000 7.410.000	40.00 35.45 35.45 35.45
1049.QBA.032 051 522131	Pos Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum Belanja Jasa Konsultansi - Honor Advokat Pengacara Piket	24.000.000 129.095.000	19.800.000 75.679.500	- 82.50 58.62	4.200.000 26.210.000	17.50 20.30	24.000.000 101.889.500	100.00 78.93	0 27.205.500	0.00 21.07
	Jumlah kegiatan 1049	129.095.000	75.679.500	58.62	26.210.000	20.30	101.889.500	78.93	27.205.500	21.07
	JUMLAH		75.679.500	58.62	26.210.000	20.30	101.889.500	78.93	27.205.500	21.07

Semarang, 3 Januari 2021
Pejabat Pembuat Komitmen
I Wayan Sasana Samarta, ST.
NIP. 198205242008041001

Mengendalikan
Kuasa Pengguna Anggaran
Desak Ketut Metriani, SH.
NIP. 197105101994032001

